# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 1.1 Partisipasi

### 1.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satu kelompok/antar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia maka partisipasi dapat disebut sebagai "Falsafah Pembangunan Indonesia"[1].

Partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pada pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dalam suatu program pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan program tersebut[2].

---

[1] Agus Mulyono.2018. Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Tesis. Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Hal:46

[2]Nadia Yunita Sari Dan Dwi Sadono. 2018. Hubungan Tingkat Partisipasi Dengan Tingkat Keberhasilan Program Desa Mandiri Pangan (Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor). Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm], Vol. 2 (3): 301-316. Hal:303

### 1.1.2 Tahap-Tahap Partisipasi

Nasdian dalam Nadia Yunita Sari Dan Dwi Sadono membagi partisipasi ke dalam empat tahapan, yaitu[3]:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan ini, yaitu perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

---

[3] Ibid

### 1.1.3 Indikator Partisipasi

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diketahui berdasarkan besarnya pengaruh yang dimiliki masyarakat di dalam proses penentuan permasalahan beserta hasilnya, dari pengaruh yang kecil sampai kepada pengaruh yang besar. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari:[4]

1. Tinjauan dan Komentar

   Masyarakat diberi kesempatan untuk meninjau suatu rencana yang diusulkan. Komentar dapat dibuat, tetapi organisasi perencanaan tidak terikat untuk mengubah atau memodifikasi rencana tersebut. Peran ini bersifat pasif, yang dirancang terutama untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan kelompok.

2. Konsultasi

   Dengan peran ini, masyarakat diangkat dan dimintai masukan serta informasi khusus. Metode yang dipergunakan untuk memperoleh masukan adalah melalui pertemuan dan kuesioner. Peran masyarakat sebagai konsultan adalah utuk menjadi bagian dari usaha pembuatan keputusan. Tujuan dari peran konsultasi ini bersifat lebih jauh, bukan hanya sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Peran ini merupakan proses komunikasi dua arah di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki keputusan.

---

[4] Agus, Mulyono. 2018. Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul. Skripsi. Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul

3. Pemberi Nasehat

   Pengaruh dan peran masyarakat bersifat lebih besar karena masyarakat diangkat ke dalam organisasi dan ditempatkan pada komite kebijakan dan perencanaan di dalam organisasi perencanaan tersebut. Tujuan dari peran ini adalah untuk memperoleh informasi maupun dukungan terorganisir untuk kegiatan-kegiatan.

4. Pengambilan Keputusan Bersama

   Peran ini menggambarkan partisipasi masyarakat dan perencana yang bertindak sebagai mitra di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang mencerminkan keinginan tim perencana yang di dalamnya memuat aspirasi masyarakat.

5. Pengambilan Keputusan Terkendali

   Dalam peran ini, masyarakat memiliki wewenang penuh atas semua kebijakan dan keputusan. Peran dari para staf profesional adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu untuk bertindak sebagai penasehat dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat Peran partisipasi masyarakat ini sangat umum untuk organisasi yang bersifat sukarela.

### 1.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Ningrum partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal[5]. Faktor internal terdapat dalam diri masyarakat yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, penghasilan luas lahan garapan, modal dan umur. Faktor eksternal dari individu merupakan faktor yang berasal dari luar individu terdiri dari faktor komunikasi yang terdiri dari gagasan, ide, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, kebutuhan masyarakat, kegiatan penyuluhan dan faktor geografis daerah yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Novia mengenai pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa, ada faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program Alokasi Dana Desa, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tersebut, yaitu[6]:

1. Faktor kesadaran atau kemauan

   Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja tetapi karena ada yang mendorongnya untuk partisipasi, yaitu faktor kesadaran itu sendiri. Apabila masyarakat sadar mengenai arti pentingnya program yang dilaksanakan, dengan sendirinya masyarakat juga akan

---

[5] Ningrum HA. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kelurahan Karang Anyar Samarinda Ulu. eJournal Sosiologi. Vol. 02(3): 1-24.

[6] Novia. 2018. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program alokasi dana desa studi di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Sociodev. 04(3): 1-18.

berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

2. Faktor pendidikan

   Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, cenderung mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatankegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang swadaya masyarakat.

3. Mata pencaharian masyarakat

   Berdasarkan mata pencaharian masyarakat yang berbeda, sangat memungkinkan tingkat partisipasinya juga berbeda-beda. Karena selain dari penghasilan atau pendapatannya yang tidak sama, tingkat kesibukannya juga berbeda-beda, semua itu dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Mayoritas masyarakat Desa Semongan bermata pencaharian sebagai petani ladang dan hal itu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Status kependudukan

   Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan masyarakat, semakin baik juga pengetahuannya mengenai lingkungannya dan lebih baik dalam penyesuaian terhadap lingkungannya dan begitu juga sebaliknya.

Menurut penelitian Nurkatamso dan Listyaningsih ada hal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu adalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Jika program yang ada sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, kemungkinannya tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut akan tinggi, dan begitupun sebaliknya. Jadi, semakin sesuai program dengan kebutuhan masyarakat, maka semakin tinggi juga tingkat partisipasinya[7].

Berdasarkan hasil penelitian Winata dan Yuliana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut[8]:

1. Umur

   Faktor umur petani dapat mempengaruhi tingkat partisipasinya. Semakin tinggi umur petani, maka keikutsertaan petani dalam perencanaan program PHBM juga semakin meningkat.

2. Tingkat Pendidikan

   Petani hutan yang berpendidikan rendah lebih sedikit dalam memahami pentingnya kehadiran dalam rapat kelompok. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga tingkat partisipasinya.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

   Semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga petani, maka semakin tinggi tingkat partisipasi dari petani tersebut dalam program PHBM.

4. Tingkat Pendapatan

---

[7]Nurkatamso A, Listyaningsih U. 2019. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program fisik program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. J Bumi Indonesia. Hal:6

[8]Winata A, Yuliana E. 2018. Tingkat partisipasi petani hutan dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Perhutani. MIMBAR Vol.28(1): 65-76

Tingkat pendapatan petani tidak hanya mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam program PHBM. Tingkat pendapatan ini juga berkaitan dengan jumlah tanggungan dalam keluarga karena ada tujuan untuk meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kesadaran dan kemauan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, status kependudukan, umur, jumlah tanggungan dalam keluarga dan tingkat pendapatan. Kemudian untuk faktor eksternalnya adalah kepemimpinan pemerintah setempat dan kesesuaian program pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakat.

## 1.2 Desa Mandiri Pangan

### 1.2.1 Pengertian Desa Mandiri Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, sehingga keberadaannya selalu dibutuhkan. Selama ini, bahan pangan dihasilkan dari sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif sebagai tempat budidaya tanaman[9]. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau dan berbasis pada

[9]Agus Nugroho Setiawan Dan Septi Nur Wijayanti. 2019. Desa Mandiri Pangan Berbasis Pekarangan Di Donokerto, Turi, Sleman, Diy. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Hal:1

keragaman sumber daya lokal (UU No. 7 Tahun 1996).

Ketahanan pangan merupakan suatu system yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan pola pemanfaatan pangan secara nasional agar memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan 14 kehalalannya[10].

Berdasarkan uraian ketahanan pangan, desa mandiri pangan merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015, mandiri pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Definisi mandiri pangan dan desa mandiri pangan, desa mandiri dapat diartikan sebagai desa yang memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan kebutuhan dasar warganya (kesehatan, pangan, pendidikan, energi, dan sebagainya) dengan memanfaatkan sumber daya setempat serta kearifan lokal secara mandiri. Desa yang mandiri dapat tercipta bila masyarakatnya mampu melibatkan dirinya dalam proses pembangunan. Pembangunan desa mandiri merupakan upaya strategis untuk mendorong pengembangan potensi lokal yang ada, baik peningkatan sumber daya

[10] Ibid

alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam perolehan sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi kehidupan mereka sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat akan beriringan dalam pengembangan desa mandiri. Berdasarkan uraian tentang desa mandiri pangan, kemiskinan di suatu wilayah dapat teratasi melalui program desa mandiri pangan yang memanfaatkan sumber daya setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin.[11]

Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan) menurut Badan Ketahanan Pangan (2013) adalah (1) salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan; (2) kegiatan lintas sektor yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan stakeholder terkait; dan (3) wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, propinsi, dan kabupaten di pedesaan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa rawan pangan, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30 persen dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) [12].

---

[11]Op.Cit. Akhmad Beny Zamroni. Hal:13
[12]Op.Cit. Mochammad Yunus Gerry Fitriadi, Sumardjo, Hamzah. Hal:456

### 1.2.2 Strategi Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan

Strategi yang dapat digunakan dalam menuju desa mandiri pangan:[13]

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan melalui prinsip:

a. Kemandirian

Prinsip kemandirian yang dilakukan melalui pendekatan Kawasan Mandiri Pangan menekankan pada perubahan sikap/mindset untuk berdikari, tidak bergantung pada pihak lain, dan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga akan mengakibatkan menurunnya RTM dan prevalensi stunting di wilayah rentan rawan pangan, berkembangnya usaha dan modal kelompok tani serta meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha. Dengan adanya prinsip kemandirian pada lokasi KMP, maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan diharapkan dapat terwujud.

b. Kecukupan Ekonomi

Kecukupan ekonomi adalah prinsip kewajaran, moderasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi dari dampak perubahan internal maupun eksternal. Kecukupan ekonomi menekankan pada jalan tengah sebagai prinsip utama petani untuk mengembangkan pertanian dari tingkat

[13]Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018

rumah tangga, masyarakat, dan bangsa dalam rangka menjamin kecukupan pangannya. Petani dapat bertahan hidup pada tingkat ekonomis cukup, asalkan masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam membantu satu sama lain untuk efisiensi biaya dan optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pertanian yang terpadu dan berkelanjutan.

c. Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, motivasi, dan kepemilikan terhadap program/kegiatan yang diterima, untuk itu mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi kegiatan kawasan, masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan.

d. Transparan dan Kredibel

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan baik pelaksana manajemen, lembaga masyarakat yang dibentuk (LKK dan FKK), kelompok, pendamping, dan mitra lainnya harus transparan dan memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Prinsip transparansi yang dilakukan dalam setiap kegiatan diharapkan dapat menjauhkan dari sikap iri, cemburu, curiga, ragu-ragu, dan lalai dalam melaksanakan kegiatan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

2. Strategi Keberlanjutan

Pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap kawasan yang sudah selesai Tahap Kemandirian, melalui:

a. Memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Kawasan Mandiri Pangan.
b. Menerbitkan regulasi/peraturan melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar kawasan tersebut dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha.
c. Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten.
d. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
e. Mengembangkan kelembagaan masyarakat agarLembaga Keuangan Kawasan (LKK) menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi tingkat kawasan/kecamatandan Forum Komunikasi Kawasan (FKK) menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan

3. Pendekatan

Pendekatan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui tiga komponenpemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor.

a. Proses pemberdayaan masyarakat kepada kelompok, yang selanjutnya disebut kelompok tani dapat dilakukan melalui:
    1) Pelatihan
    2) Demplot
    3) Pendampingan, dan

4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

b. Proses penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui:

1) Pelatihan teknis (administrasi keuangan, organisasi dan kelembagaan).
2) Pendampingan pengelolaan modal kelompok
3) Peningkatan kerjasama dengan lembaga permodalan, dan
4) Kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan pemasaran.

c. Proses peningkatan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan melalui: (1) rapat koordinasi kawasan baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten; (2) pembentukan dan optimalisasi tim provinsi dan kabupaten untuk mendorong percepatan sarana prasarana; (3) dan kerja sama program/kegiatan antar lintas sektor untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di kawasan.

Fasilitasi pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan input yang meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan. Untuk mengoperasionalkan strategi tersebut, maka kawasan mandiri pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan: Pengembangan, Kemandirian, dan Keberlanjutan.

### 1.2.3 Pendekatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pendekatan pengembangan desa mandiri pangan yang digunakan sangat tergantung kepada potensi, peluang dan persoalan yang dihadapi masyarakat suatu daerah. Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan desa mandiri pangan (Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015):

1. Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk merubah perilaku masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya sendiri.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat di perdesaan antara lain kelompok afinitas yang berperan sebagai pelaku pengembangan usaha produktif, tim pangan desa yang berperan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan lembaga keuangan desa sebagai layanan usaha produktif perdesaan.
3. Penguatan sistem ketahanan pangan Pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi untuk meningkatkan akses fisik dan akses ekonomi masyarakat.

### 1.3 Desa

Desa secara etimologi, Desa berasal dari bahasa sansekerta, Dhesi, yang artinya tanah kelahiran. Sebagai tanah kelahiran, desa dipahami sebagai tempat atau wilayah yang menggambarkan kehidupan sosial penduduknya. Jadi desa

tidak dilihat dari kenampakan fisiknya. Pola pemukiman desa bersifat dinamis, masyarakat senantiasa beradaptasi spasial dan ekologis, serta lekat dengan kegiatan agraris. Konon, istilah desa dari Bahasa sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Istilah desa awalnya sering digunakan untuk menyebut unit pemukiman kecil di Pulau Jawa (pada masa kolonial belanda). Saat itu desa mulanya dihuni orang satu keturunan. Mereka memiliki nenek moyang sama, yaitu para cikal bakal pendiri pemukiman tersebut. Pemenuhan kebutuhan, permasalahan ekonomi juga bermunculan. Beberapa keluarga keluar, mendirikan pemukiman baru dengan cara membuka hutan.[14]

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.[15] Tata Kelola desa dalam UU No.6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.[16]

UU No 6 Tahun 2014 juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Dipahami sebagai bagian dari

---

[14]Sri Mintarjo, Eka Susi Sulistyowati. 2019. Perwilayahan Desa dan Kota. Klaten: Suka Mitra Kompetensi. Hal:21

[15]Amtai Alaslan. 2020. Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. Jurnal AdBisPower-STIA Saumlaki. Vol. 1 No 1. Hal:102.

[16]Eka Setyowati. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membngun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Vol. 9 No. 2

Gerakan reformasi, berbagai kebijakan tentang desa menumbuhkan harapan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom.[17] Istilah desa di Indonesia, menurut konsep lama ditandai sebagai berikut:

1. Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
2. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim.
3. Keluarga desa merupakan suatu unit social dan unit kerja.
4. Jumlah penduduk desa dan luas desa tidak begitu besar.
5. Struktur ekonominya domineered agraris.
6. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban atau gemeinschaft.
7. Proses sosialnya berjalan lambat.
8. Warga desa berpendidikan rendah dengan kehidupan yang terpencil dan sederhana.

Sedangkan desa menurut konsep baru, istilah desa dalam arti baru sudah agak lain, karena terbukanya hubungan langsung dengan kota dan desa terdekat, dan tidak langsung sebagai akibat terbentuknya hubungan Indonesia dengan luar negeri. Keadaan yang baru ini mengakibatkan terbukanya pikiran warga desa, sehingga masalah Pendidikan, masalah ekonomi pedesaan dan masalah pengembangan desa mendapat tanggapan dan kenyataan yang baik. Perubahan ini membawa pandangan-pandangan baru mengenai pengertian/definisi desa yang berada dengan pengertian desa menurut konsep lama. Lebih-lebih apabila

[17]Nata Irawan. 2020. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal:32.

dibandingkan dengan keadaan desa-desa pada zaman penjajahan.[18] Fungsi desa dari berbagai segi dapat ditemukan beberapa fungsi desa:

1. Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang (hinterland) yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung "bahan mentah" dan lumbung "tenaga manusia yang tidak kecil artinya".
3. Dari segi mata pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur desa industry, desa nelayan dan sebagainya.
4. Dari segi tahap-tahap Repelita desa berfungsi sebagai potensi pembangunan dan pamer pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia.

Dengan fungsi desa sebagai potensi dan partner pembangunan, sudah jelas bahwa warga desa pada waktu ini dan yang akan datang merupakan eksponen pembangunan yang penting.

## 1.4 Kerangka Pikir

Kemandirian desa, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 yang tertuang dalam konsep pembangunan desa mandiri terdiri dari beberapa faktor pendukung yakni, kelembagaan, penganggaran, partisipasi masyarakat/sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk mewujudkan kemandirian sepenuhnya tentu tidak akan cukup jika hanya

[18]Syamsul Bardi. 2020. Pengantar Geografi Desa. Banda Aceh: Al-Washliyah University Press (AUP). Hal:18

melibatkan peran pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat inilah yang menjadi penentu suatu desa dikatakan mandiri atau tidak. Akan tetapi, masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika berhadapan dengan pemerintah. Sehingga pekerjaan pemerintah yang paling utama adalah memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan desa.

Partisipasi ditempatkan sebagai bagian terpenting dari proses pembangunan desa mandiri pangan, sekaligus menjadi faktor penentu apakah sebuah desa dikatakan mandiri atau belum mandiri. Untuk dapat melihat kerangka pikir penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

.
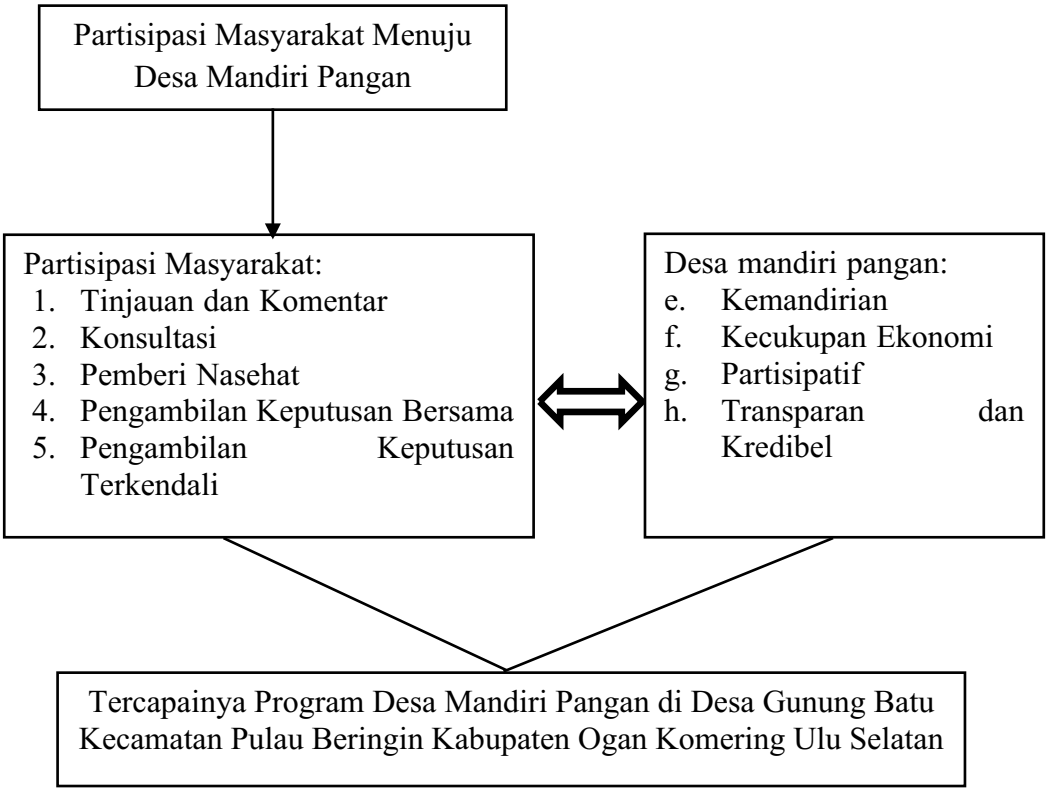
**Gambar 2.1**
**Kerangka Pikir**